



RESISTENSI MASYARAKAT DUSUN DOPOKOMIL TERHADAP PERTAMBANGAN SENG PT. DAIRI PRIMA MINERAL DI KECAMATAN SILIMA PUNGGA-PUNGGA, KABUPATEN DAIRI

Antony Bincar Tua Simanullang¹⁾, Gede Indra Pramana²⁾, Efatha F.Borrromeu Duarte³⁾

^{1,2,3)}Universitas Udayana, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Denpasar
Jl. PB. Sudirman, Denpasar-(0361) 255378,255916

Abstract (English)

This study analyzes the process of dynamics of Sopokomil Village Community Resistance in Silima Pungga-punggan District with PT. Dairi Prima Mineral zinc mining. This study uses the Social Conflict theory of Karl Marx and the Social Movement theory of Charles Tilly. This study also uses qualitative methods. The results of this study indicate that the Sopokomil Village Community involved in resistance with PT. Dairi Prima Mineral mining underwent a very long dynamic process. The community, which is composed of several clan elements, professions, is united because of concerns regarding the impact of mining if it continues. The mining party does not deny that there is resistance from the community around the mine. The government through the Sub-district Head of Silima Pungga-pungga District also often holds open audiences to find solutions or ways out for both parties. The community demands the closure of the mine because they argue that the mine will bring disaster, but the government wants the mine to continue to exist to increase cash income. Of the several pre-trial hearings conducted, the Jakarta PTUN pre-trial hearing decided to revoke PT. Dairi Mineral's environmental permit and ordered the Ministry of Environment to review the Environmental Permit. As a result of this decision, mining activities were stopped until the environmental permit review from the Ministry of Environment and Forestry was reviewed again.

Article History

Submitted: 10 February 2025

Accepted: 19 February 2025

Published: 20 February 2025

Key Words

Resistance, Mining, PT. Dairi
Prima Miner

Abstrak (Indonesia)

Penelitian ini menganalisis proses dinamika perlawanan masyarakat Desa Sopokomil, Kecamatan Silima Pungga-punggan, terhadap pertambangan seng PT. Dairi Prima Mineral yang melakukan penambangan seng. Penelitian ini menggunakan teori Konflik Sosial dari Karl Marx dan teori Gerakan Sosial dari Charles Tilly. Penelitian ini juga menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Masyarakat Desa Sopokomil yang terlibat perlawanan dengan PT. Dairi Prima Mineral mengalami proses dinamika yang sangat panjang. Masyarakat yang terdiri dari beberapa unsur marga, profesi, bersatu karena adanya kekhawatiran akan dampak pertambangan jika terus berlanjut. Pihak pertambangan tidak memungkiri adanya resistensi dari masyarakat sekitar tambang. Pemerintah melalui Camat Kecamatan Simalungun juga sering melakukan audiensi terbuka untuk mencari solusi atau jalan keluar bagi kedua belah pihak. Masyarakat menuntut penutupan tambang karena berpendapat bahwa tambang akan membawa bencana, namun pemerintah menginginkan tambang tetap ada untuk menambah pemasukan kas daerah. Dari beberapa kali sidang praperadilan yang dilakukan, sidang praperadilan PTUN Jakarta memutuskan untuk

Sejarah Artikel

Submitted: 10 February 2025

Accepted: 19 February 2025

Published: 20 February 2025

Kata Kunci

Perlawanan, Pertambangan,
PT Dairi Prima Miner



mencabut izin lingkungan PT. Dairi Mineral dan memerintahkan Kementerian Lingkungan Hidup untuk meninjau ulang Izin Lingkungan. Akibat putusan ini, kegiatan penambangan dihentikan sampai dengan peninjauan kembali izin lingkungan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ditinjau kembali.

1.PENDAHULUAN

Dalam pengelolaan sumber daya alam, tidak jarang muncul konflik antara pihak-pihak yang berkepentingan dan terlibat memiliki kebutuhan dan tujuan yang berbeda terhadap sumber daya alam di wilayahnya. Pada dasarnya adalah bagaimana konflik itu tidak dibiarkan terus berkelanjutan dan berubah menjadi konflik dengan kekerasan, harus ada inisiatif untuk menangani konflik secara tepat guna dan berkelanjutan. Program *United Nations Environment Programme* menyatakan bahwa dalam 60 tahun terakhir, paling tidak 40 % dari semua konflik dalam negara memiliki kaitan dengan sumber daya alam, dan bahwa kaitan ini meningkatkan risiko munculnya konflik dalam lima tahun pertama. Sejak tahun 1990, setidaknya 18 konflik kekerasan dipicu oleh penguasaan sumber daya alam, baik yang bernilai tinggi seperti kayu, intan, emas, mineral, minyak maupun yang terbatas seperti air dan tanah yang subur (*United Nations Peacekeeping*). Peneliti juga mengutip dari pushep.or.id, Rachma Wiriosudarmo menyampaikan bahwa, secara global konflik pertambangan semakin meningkat setiap tahunnya tak terkecuali di Indonesia. Dari tahun 2002 sampai tahun 2013 konflik bertambah seiring penambahan kegiatan eksplorasi dan tingginya investasi .

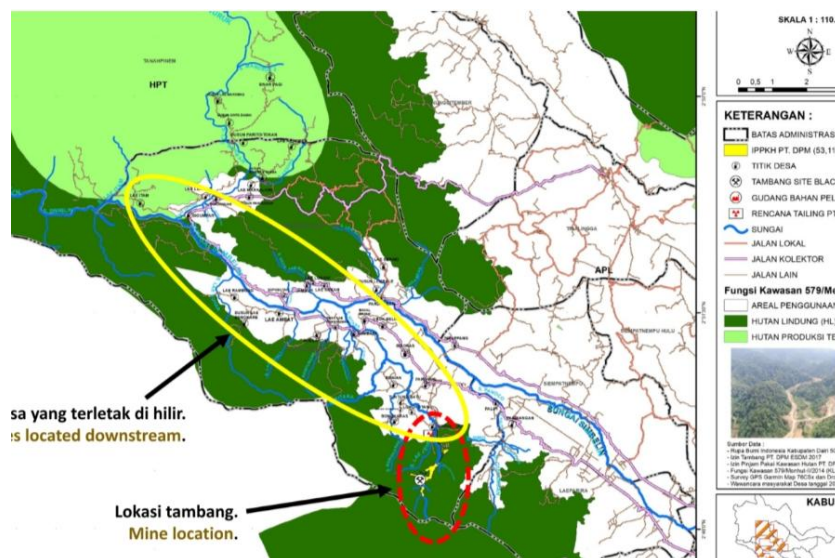
Proyek Pertambangan Mineral seng bawah tanah (*Underground*) yang dilaksanakan oleh PT Dairi Prima Mineral (DPM) yang terletak di daerah bernama Sopokomil, Kecamatan Silima Punga-punga, Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Selain daripada mengeksplorasi bijih seng sulfida sebagai bijih sekunder, DPM juga akan mengeksplorasi galena yang merupakan mineral berupa timbal sulfida dan perak. Proyek ini 51% saham dimiliki oleh *Foreign Engineering & Construction Co.Ltd* dari NFC China (*China Nonferrous Metal Industry*) dan 49% saham dimiliki oleh PT Bumi Resources Minerals Tbk. DPM menerima Kontrak Karya yang diberikan oleh Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 18 Februari 1998. Berdasarkan ketentuan Kontrak Karyanya, DPM diberikan izin untuk menambang mineral di area seluas 24.636 hektar yang berada di Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Aceh. Pada 8 Desember 2017, Pemerintah Indonesia menerbitkan Izin Operasi Produksi. Sebagai anggota korporat yang memiliki tanggung jawab secara sosial baik di Indonesia maupun komunitas pertambangan dunia yang lebih luas, DPM berkomitmen untuk mengimplementasikan dan mempertahankan standar terbaik dalam pemeliharaan lingkungan, kesehatan dan keselamatan kerja, serta tata kelola perusahaan. Berdasarkan keterlibatannya dengan semua stakeholder secara tepat waktu, jujur, dan komunikasi dua arah yang transparan (PT. Dairi Prima Mineral).

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pun telah melepas sebanyak 53,11 hektar untuk PT.Dairi Prima Mineral melalui skema Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan pada tahun 2012 lalu. Hutan Lindung Register 66 Batu Ardan itu merupakan kawasan tangkapan air sungai Lae Simbelin yang mengalir hingga ke Aceh. Bahkan, di kawasan hutan yang sebagiannya masuk konsesi tambang PT.Dairi Prima Mineral terdapat mata air yang menghidupi masyarakat di delapan desa di Dairi.Tambang PT.Dairi Prima Mineral juga mengancam kabupaten Dairi sebagai kawasan Taman Nasional Gunung Leuser yang



memiliki sistem penyangga kehidupan; pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan satwa beserta ekosistemnya, merupakan situs warisan dunia.

Selain itu, konsesi tambang PT. DPM, termasuk lokasi bendungan tailing raksasa yang dibangun, letaknya berada tepat di kawasan patahan gempa bumi. Mengingat Sumatera Utara dilalui 3 segmen patahan yang merupakan jalur perambatan gempa bumi yang salah satunya segmen patahan Renun yang berada di Kabupaten Dairi. Bahkan tercatat pada 2018 lalu, Patahan Renun kembali bergerak dan menimbulkan gempa dengan kekuatan 5 magnitudo yang terasa di sebagian wilayah Sumatera Utara. Kemudian pada 20 September 2019 gempa terjadi lagi di Dairi dengan kekuatan 3 magnitudo. Letak bendungan *tailing* yang berada dekat di atas Desa Sopokomil, Kabupaten Dairi, itu mempertaruhkan keselamatan nyawa ratusan ribu penduduk. Dimana lokasi bendungan *tailing* yang ditentukan itu, berada di atas struktur tanah yang tidak stabil serta daerah dengan curah hujan tinggi. Selain itu, Pembangunan serta Pelaksanaan Kegiatan Pertambangan oleh PT. Dairi Prima Mineral membuahakan Permasalahan baru di kalangan masyarakat dan berdampak kepada pemenuhan kebutuhan masyarakat menjadi terganggu, seperti: sandang, pangan dan papan, kesehatan, kebersamaan dan kesatuan serta interaksi antar warga sekitar.



Sumber : [https:// www.mongabay.co.id/tambang-dairi-prima-berada-di-daerah-rawan-bencana](https://www.mongabay.co.id/tambang-dairi-prima-berada-di-daerah-rawan-bencana)

Perubahan sosial dan lingkungan dialami masyarakat di desa Sopokomil setelah hadirnya PT. Dairi Prima Mineral akibat adanya aktivitas tambang menyebabkan terjadinya peralihan pekerjaan masyarakat yang lebih memilih menjadi buruh harian lepas dan menganggap pekerjaan sebagai petani adalah pilihan terakhir. Selain itu, dampak lingkungan yang terjadi antara lain kerusakan lahan pertanian dan terjadinya banjir dan longsor disekitaran pemukiman warga.

Tidak hanya itu, kehadiran PT. DPM juga menimbulkan gerakan sosial dalam rangka penolakan kehadiran PT. DPM di Kabupaten Dairi. Satu di antara organisasi masyarakat yang menentang pendirian tambang PT. DPM adalah Organisasi Perempuan Desa Pandiangan. Organisasi tersebut membuat perlawanan dengan melaksanakan audiensi terhadap pemerintah daerah hingga pemerintah pusat sebagai pembuat kebijakan pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Bupati, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Kemudian mereka



mengajak masyarakat Desa Pandiangan dan desa lainnya untuk menyadari terkait dampak negatif dari aktivitas pertambangan bagi kehidupan masyarakat.

Adapun masyarakat sekitar telah melakukan aksi demonstrasi baik di Kantor Camat setempat, Kantor Bupati bahkan melakukan aksi di depan Mahkamah Agung. peneliti telah merangkum aksi demonstrasi yang telah dilakukan oleh masyarakat sekitar melalui tabel dibawah ini,

Tabel Runtutan Aksi Masyarakat Gabungan Kecamatan Silima Punga-punga

No	Tanggal	Aksi	Lokasi
1	25 Februari 2019	Masyarakat menuntut pencabutan izin tambang	Kantor DPRD Kab.Dairi
2	30 Agustus 2019	Organisasi masyarakat desa sekitar menuntut untuk menghentikan proses tambang	Kantor Kepala Desa Longkotan
3	3 Mei 2021	Aksi masyarakat menolak PT.DPM	Kantor Bupati Dairi dan Kantor DPRD Kab.Dairi
4	27 Mei 2021	Aksi unjuk rasa kembali digelar oleh Organisasi masyarakat sekitar	Kantor kementerian KLHK
5	30 Juni 2022	Organisasi Petrasa, GMKI, mahasiswa dan Pemuda Dairi melakukan unjuk rasa tolak pertambangan PT.DPM	Kantor Bupati Dairi dan Kantor DPRD Kab.Dairi
6	24 Agustus 2022	Organisasi masyarakat Peduli Lingkungan melakukan Aksi Damai	Kantor Bupati Dairi dan Kantor Konjen Tiongkok di Medan
7	30 Agustus 2022	Masyarakat Dairi dan <i>Civil Society</i> mengirim surat kepada Kedutaan Besar China di Indonesia	Kedutaan Besar China di Indonesia di Jakarta
8	1 November 2022	Unjuk Rasa dilakukan oleh Organisasi Aliansi Petani Dairi Untuk Keadilan	Kantor Bupati Dairi
9	23 November 2022	Aksi dilakukan menolak sosialisasi addendum AMDAL PT.DPM	Hotel Beristera,Dairi
10.	11 Juni 2024	Massa melakukan aksi stop Pendanaan tambahan dari Pemerintah Tiongkok kepada PT.Dairi Prima Mineral	Kedutaan Besar Tiongkok

Sumber : <https://jatam.org>,<https://.kompas.id> dan <https://opsi.id>

2.KAJIAN PUSTAKA

Pada penelitian ini, penulis mengkaji beberapa penelitian yang berkaitan topik permasalahan penelitian ini untuk bahan perbandingan. Adapun penelitian yang dikaji adalah sebagai berikut.

Penelitian Pertama berjudul “*Mining and Community Development in Indonesia : A Case Study*” yang diteliti oleh Anif Fatwa Chawa pada Tahun 2014.Adapun hasil dari Penelitian tersebut adalah Industri pertambangan secara luas dianggap merusak lingkungan dan masyarakat lokal. Pemerintah Indonesia mewajibkan industri pertambangan untuk melakukan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan termasuk kegiatan pengembangan masyarakat.Penelitian ini menyelidiki implementasi komunitas dikembangkan oleh perusahaan pertambangan di Pulau Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Indonesia.

Penelitian Kedua adalah “Resistensi Penambang Illegal : Studi Kasus Eskploitasi Tambang Galian B (Emas) di Desa Sayurmatua Kecamatan Naga Juang Kabupaten



Mandailing Natal” yang ditulis oleh Patmasari Nainggolan pada tahun 2018. Adapun hasil dari penelitian ini adalah bertujuan untuk mengetahui resistensi penambangan liar: studi kasus eksploitasi tambang B (emas) di desa Sayurmatua, Naga Juang, kabupaten Mandailing Natal. Penelitian ini adalah dilakukan dengan pendekatan metode penelitian kualitatif dengan data primer dari lokasi penelitian, Penelitian ini mencoba mengurai dan mendeskripsikan fenomena yang terjadi dalam kaitannya dengan resistensi Penambangan ilegal: studi kasus eksploitasi tambang galian B (emas), apa saja aspeknya penyebab para penambang emas ilegal tetap bertahan, dan bagaimana mengetahui pengertian Sayurmatua Desa Naga Juang Kabupaten Mandailing Natal tentang pencemaran lingkungan sehingga penambangan liar masih bertahan.

Penelitian Ketiga yang berjudul “ Tambang dan Perlawanan Rakyat : Studi Kasus Tambang di Manggarai ,NTT “ yang ditulis oleh Max Regus pada tahun 2011. Adapun hasil dari Penelitian ini adalah Sejak lebih dari satu dekade yang lalu, Mining Corp. telah hadir mempertahankan peran yang menantang di hadapan pemerintah sebagai tuan rumah dan masyarakat adat setempat, khususnya pemilik tanah. Mencerminkan ketegangan dan kompleksitas sosial terlihat jelas di Manggarai, Flores, Ntt (pengecualian bagi banyak negara maju yang memiliki komunitas masyarakat adat). Mining Corp. tidak membina hubungan baik dengan masyarakat adat setempat. Dengan kata lain, mereka cenderung menimbulkan kerusakan yang luas di masyarakat lokal.

Penelitian Keempat yang berjudul “ Resistensi berbasis Adat : Perlawanan Masyarakat Nagari III Koto, Tanah Datar, Sumatera Barat, Terhadap Rencana Tambang Bukit Batubasi “ yang ditulis oleh Yulisa Fringka pada tahun 2016. Adapun hasil dari Penelitian ini adalah Artikel ini membahas mengenai resistensi masyarakat lokal terhadap korporasi pertambangan. Kajian ini fokus pada pendekatan konflik yang dilihat apakah bisa menjadi sebuah gerakan sosial atau tidak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus yang dilaksanakan di Nagari III Koto Sumatera Barat. Artikel ini menunjukkan kepada kita bahwa ada tujuh variabel yang menjadi penyebab resistensi.

Penelitian Kelima yang berjudul “Resistensi Masyarakat lokal terhadap pengadaan Perusahaan Tambang Emas oleh Pemerintah di Gunung Tumpangpitu Desa Sumberagung Kabupaten Banyuwangi” yang ditulis oleh Muhammad Roddini pada Tahun 2017. Adapun Hasil dari Penelitian ini adalah Dalam beberapa hal, ada beberapa persyaratan yang diperlukan bagi Masyarakat untuk berpartisipasi dalam industrialisasi. Sementara itu, di sisi lain masyarakat sudah mempunyai sejumlah regulasi sosial sebagai respon dan cara pandang (budaya) yang tidak bisa diabaikan begitu saja.

Dalam mengkaji topik penelitian ini, penulis menggunakan teori Konflik Sosial dari Karl Marx dimana teori ini muncul dari bentuk reaksi atas hadirnya teori fungsionalis Struktural yang dianggap kurang memperhatikan konflik sebagai salah satu gejala di Masyarakat yang perlu mendapatkan perhatian. “Pemikiran yang paling berpengaruh atau menjadi dasar dari teori konflik ini adalah pemikiran Karl Marx dan pada tahun 1950-an, dimana teori konflik yang semakin mulai merebak” (Bernard : 2007).

Teori ini memiliki tujuan untuk menganalisa asal dan usul suatu kejadian, terjadinya sebuah pelanggaran peraturan atau latar belakang seseorang yang memiliki perilaku yang menyimpang. Fenomena Konflik disini memiliki arti untuk menekankan sifat pluralistik dari masyarakat dan ketidakseimbangan distribusi kekuasaan yang terjadi antara berbagai kelompok, karena kekuasaan yang dimiliki oleh kelompok elit, maka kelompok itu juga memiliki kekuasaan (*Power*) untuk menciptakan aturan. Khususnya hukum yang bisa melayani kepentingan mereka.



Kedua, Teori Gerakan Sosial oleh Charles Tilly. Teori gerakan sosial Charles Tilly adalah kerangka kerja yang komprehensif untuk memahami bagaimana dan mengapa gerakan sosial muncul, berkembang, dan mencapai (atau gagal mencapai) tujuan mereka. Tilly, seorang sosiolog dan sejarawan terkemuka, mengembangkan teori ini berdasarkan penelitiannya yang luas tentang gerakan sosial di Eropa dan Amerika Utara.

Dalam pemahaman Tilly, aksi kolektif lebih dimaknai sebagai tindakan sekelompok orang secara bersama dalam mencapai tujuan bersama. Jadi berdasar definisi ini perubahan sosial dan bentuk-bentuk protes sosial merupakan bentuk dari aksi kolektif. Menurut Tilly, ketidakpuasan rakyat saja (baik akibat dislokasi sosial, modernisasi atau sebab-sebab lainnya) tidak serta merta membuat mereka melakukan aksi kolektif. Rakyat yang tidak puas tidak turut berpartisipasi aktif dalam aksi kolektif kecuali mereka menjadi bagian dari satu kelompok terorganisir yang memiliki beberapa sumber daya. Menurut Tilly, dalam aksi kolektif terdapat dua komponen penting yakni organisasi dan sumber daya selain kondisi obyektif yang berupa ketidakpuasan yang meluas. Bahkan ancaman yang dilancarkan oleh pemerintah dan kelompok-kelompok kontra tidak bisa menyurutkan partisipasi rakyat tidak puas yang telah terorganisir dan memiliki sumber daya otonom untuk melakukan aksi kolektif (Tilly, 1978).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif model studi kasus. Studi kasus merupakan model penelitian yang berusaha mengkaji kondisi, kegiatan, perkembangan, dan faktor-faktor dalam kondisi dan perkembangan terkait individu maupun kelompok (Hardani et al., 2020). Kasus yang diangkat dapat terjadi karena terdapat masalah, kesulitan, hambatan, penyimpangan, bahkan keunggulan atau keberhasilannya. Atas dasar tersebut, penelitian ini berusaha mengeksplorasi lebih dalam proses Resistensi Masyarakat Dusun Sopokomil terhadap Pertambangan Seng PT. Dairi Prima Mineral di Kecamatan Silima Pungga-pungga.. Lebih lanjut, penelitian ini menggunakan data primer dari hasil observasi di Dusun Sopokomil dan data sekunder berupa dokumen surat; buku; jurnal; dan web.

4. PEMBAHASAN

Resistensi Masyarakat Dusun Sopokomil terhadap Pertambangan PT. Dairi Prima Mineral

Kehadiran PT. Dairi Prima Mineral yang menambang seng di Kecamatan Silima Pungga-pungga melalui Kontrak Karya yang dikeluarkan Pemerintah Indonesia pada 18 Februari 1998. Pada Proses permulaan pembukaan tambang, Masyarakat yang berada disekitaran tambang awalnya tidak setuju karena mereka berpikiran bahwasanya tambang itu akan mengambil lahan sawah dan rumah mereka. Pada akhirnya pihak tambang mengumumkan kepada masyarakat bahwasanya Tambang akan dilaksanakan dibawah tanah *Underground mining*. Beberapa masyarakat menyetujui proses tambang dilanjutkan dan beberapa masyarakat tetap menolak karena kekhawatiran mereka dimana tambang bawah tanah yang sewaktu-waktu dapat roboh.

Pada tanggal 11 Juni 2024, masyarakat yang terancam oleh rencana beroperasinya tambang Dairi Prima Mineral (DPM) di Kabupaten Dairi berkumpul di depan Kedutaan Besar Tiongkok dan Mahkamah Agung di Jakarta untuk mengekspresikan kekesalan karena pemerintah Indonesia, pengembang tambang, dan pemodal baru yang dikendalikan oleh pemerintah Tiongkok tetap berupaya untuk mendorong proyek agar berlanjut, meskipun banyak bukti yang menunjukkan tambang tersebut dapat menimbulkan risiko yang berat dan mematikan bagi desa-desa sekelilingnya.



Demonstrasi di luar kedutaan Tiongkok merupakan tanggapan atas berita terbaru yang mengatakan bahwa apabila ada sebuah perusahaan yang dikendalikan oleh pemerintah Tiongkok telah mengumumkan akan memberikan dana ratusan juta dolar untuk membantu agar proyek bisa berlanjut. Mereka menuntut pemerintah Tiongkok, sebagai pemegang saham dari investor terbesar dan pengembang proyek, beserta regulator perusahaan-perusahaan ini, agar segera menghentikan pembangunan dan pendanaan proyek Pertambangan Seng PT.DPM.

Resistensi atau Penolakan masyarakat yang didorong oleh para tetua adat melakukan aksi damai dan aksi penolakan. Beberapa kali mereka melakukan aksi di depan Kantor PT.Dairi Prima Mineral, akan tetapi mereka diusir oleh pihak keamanan karena alasan mengganggu kerja para pegawai kantor tambang PT.Dairi Prima Mineral. Mereka juga melakukan beberapa aksi di Kantor Bupati Dairi dan Kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Dairi. Akan tetapi ketika melakukan beberapa kali aksi di depan kantor bupati Dairi, Bupati Dairi tidak pernah menghadiri dan bahkan memilih pergi melakukan kunjungan daerah ke kecamatan yang lain. Melihat Kepala Daerah yang sepertinya tidak memiliki simpati kepada mereka, pada akhirnya mereka melakukan aksi ke kantor komjen Tiongkok di Medan dan ke Kantor Kedutaan Besar China di Jakarta. Mereka didudung oleh beberapa Organisasi Non Pemerintah salah satunya adalah Walhi.

Hasil Temuan ini mengungkapkan faktor-faktor Penolakan masyarakat terhadap kehadiran tambang PT.Dairi Prima Mineral. Penolakan masyarakat yang pada umumnya adalah dikarenakan kekhawatiran masyarakat dengan kelestarian alam yang dimana kehadiran tambang ini akan merusak alam sekitar. Pihak tambang yang seharusnya mendengarkan masukan dan pendapat masyarakat terkait hal mereka menolak malah membiarkan dan acuh tak acuh kepada masukan masyarakat tersebut.

Tanggapan Pemerintah terkait Resistensi Masyarakat Dusun Sopokomil terhadap Pertambangan PT. Dairi Prima Mineral

Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Kabupaten Dairi menghadapi gelombang protes dan penolakan dari masyarakat Kecamatan Silima Pungga-pungga. Khususnya dari Masyarakat Desa Sopokomil terkait proyek tambang seng PT.Dairi Prima Mineral yang sedang dijalankan. Masyarakat mengungkapkan kekhawatiran akan dampak lingkungan, kesehatan, dan sosial yang ditimbulkan oleh aktivitas tambang tersebut. Banyak dari mereka merasa bahwa suara mereka tidak didengar dan bahwa kepentingan ekonomi seringkali mengalahkan kebutuhan akan keberlanjutan lingkungan.

Menanggapi resistensi ini, pemerintah Kabupaten Dairi melalui Camat Silima Pungga-pungga mengambil langkah-langkah untuk membuka dialog dengan masyarakat. Dalam sebuah wawancara dengan menyatakan, "Kami dari Pemerintah Kecamatan Silima Pungga-pungga memahami kekhawatiran yang disampaikan oleh masyarakat. Kesejahteraan dan kesehatan mereka adalah prioritas kami. Oleh karena itu, kami berkomitmen untuk melibatkan masyarakat dalam setiap tahap proyek tambang."

Camat Silima Pungga-Pungga melihat bahwa Perlawanan masyarakat terkait Proses tambang tersebut, tidak merupakan bisa digambarkan secara keseluruhan. Melainkan, Camat Silima Pungga-pungga melihat aksi tersebut hanyalah segelintir orang yang dibantu

oleh organisasi non-Pemerintah. Walaupun demikian pihak kecamatan tetap mendengarkan dan berusaha selalu untuk mengadakan audiensi dengan pendapat dengan masyarakat yang melakukan perlawanan.



Isu-isu yang digencarkan atau yang ditolak masyarakat itu sendiri selalu berfokus kepada isu lingkungan seperti, Banjir, Tanah Longsor maupun kemungkinan runtuhnya terowongan tambang yang berada didalam tanah. Camat Silima Pungga-Pungga pun mengetahui akar atau dasar dari permasalahan ini yaitu izin lingkungan atau AMDAL dari PT. Dairi Prima Mineral. Mediasi atau saling dengar pendapat sering dilakukan oleh Pemerintah demi mencari sebuah jalan keluar/Solusi bagi kedua belah pihak, berikut wawancara dengan Camat Silima Pungga-Pungga.

Akar Permasalahan yang memang dari izin lingkungan sudah diakui oleh Bapak Camat. Meyakinkan Peneliti bahwasanya masyarakat yang menolak tambang memang sering menjadi atensi pihak pemerintah. Munculnya masalah baru yaitu ganti rugi lahan yang tidak sesuai dengan persetujuan antara pihak tambang dengan masyarakat. Resistensi masyarakat terhadap tambang sering dipicu oleh kekhawatiran akan dampak lingkungan, sosial, dan ekonomi yang mungkin ditimbulkan. Dalam menghadapi tantangan ini, pemerintah Kecamatan Silima Pungga-pungga telah mengambil berbagai langkah strategis untuk mencegah terjadinya konflik serupa, dengan tujuan menciptakan keharmonisan dan keberlanjutan dalam pengelolaan sumber daya alam

Dalam sebuah langkah monumental, masyarakat Dairi berhasil menanggalkan rencana eksplorasi tambang PT. Dairi Prima Mineral setelah melalui perjuangan panjang dan penuh tantangan. Aksi penolakan yang dimulai dari kesadaran kolektif akan pentingnya menjaga lingkungan dan sumber daya alam akhirnya membuahkan hasil.

Masyarakat Dairi, yang terdiri dari petani, pemuda, dan tokoh adat, secara aktif mengorganisir diri melalui berbagai forum diskusi, aksi demonstrasi, dan kampanye kesadaran lingkungan. Mereka menyoroti dampak negatif yang mungkin ditimbulkan oleh aktivitas tambang, seperti kerusakan lahan pertanian, pencemaran sumber air, dan ancaman terhadap keberlanjutan kehidupan sehari-hari mereka.

Kemenangan ini semakin diperkuat oleh dukungan berbagai lembaga non-pemerintah dan aktivis lingkungan, yang membantu menyebarluaskan informasi serta mengadvokasi hak-hak masyarakat lokal. Dengan berpegang pada prinsip demokrasi dan keadilan lingkungan, masyarakat Dairi berhasil menggugah perhatian publik dan pemerintah, yang pada akhirnya memutuskan untuk menghentikan izin tambang bagi PT. Dairi Prima Mineral.

Pada Akhirnya masyarakat yang menolak kehadiran tambang tersebut dimenangkan oleh PTUN Jakarta dengan mengabulkan gugatan / kasasi Masyarakat dengan Nomor Perkara 59/G/LH/2023/PTUN JKT. Dimana ijin Lingkungan PT. Dairi Prima Mineral harus dicabut. Kemenangan ini membuktikan bahwa masyarakat masih dianggap dalam Perhukuman di Indonesia.

Analisis dengan Teori Konflik Sosial

Hasil Temuan Peneliti pertama sekali dikaji dengan Teori Konflik Sosial dari Karl Max. Konflik Sosial adalah hasil dari pertentangan antara kelas-kelas dalam masyarakat, khususnya antara kelas yang memiliki kekuasaan (borjuis) dan kelas yang tidak memiliki kekuasaan (proletariat). Marx berpendapat bahwa konflik ini terjadi karena adanya ketidaksetaraan dalam penguasaan sumber daya dan alat produksi.

Berdasarkan Teori Konflik Sosial oleh Karl Max, resistensi masyarakat Desa Sopokomil dapat dianalisis dari tiga variabel yang sudah disebutkan di atas. Pemahaman yang mendalam terkait masing-masing variabel dimensi ini akan memberikan gambaran yang



kompleks dan komprehensif mengenai resistensi masyarakat Desa Sopokomil terhadap Pertambangan Seng PT. Dairi Prima Mineral. Cara masyarakat Melakukan resistensi merupakan kunci dan jiwa dari penelitian ini.

Pihak Pertambangan PT. Dairi Prima Mineral menolak untuk mengganti tuntutan masyarakat tersebut dengan alasan tidak merugikan kedua belah pihak. Masyarakat khawatir akan dampak negatif yang mungkin ditimbulkan oleh aktivitas pertambangan, seperti pencemaran air, kerusakan lahan, dan gangguan pada ekosistem. Kondisi lingkungan yang sehat adalah bagian penting dari kehidupan sehari-hari masyarakat, terutama yang bergantung pada pertanian dan sumber daya alam.

Kelanjutan dari Konflik ini berlanjut dengan aksi damai dengan tujuan untuk menutup tambang yang beroperasi yang dilakukan masyarakat didepan gerbang masuk lokasi pertambangan sering kali dihadapkan dengan Satpam Tambang bahkan tidak jarang juga Polisi menghadang masyarakat dalam melakukan Aksinya. Melihat tidak adanya Perlindungan dari Polisi dan dukungan dari Pihak Pemerintah melalui Pemerintah Kecamatan, akhirnya masyarakat melakukan aksinya didepan kantor Bupati Dairi dan Kantor Dewan perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Dairi. Hasil dari aksi kegiatan itu adalah tidak ada jalan keluar dan Solusi dari kedua belah pihak baik dari pihak Bupati sebagai Kepala Daerah dan Pihak DPRD sebagai Pihak Legislatif. Bahkan Bupati Dairi tidak pernah bertemu dengan massa yang melakukan Aksi.

Variabel Diamensi berikutnya yaitu dinamika Konflik. Dimana Dinamika Konflik dapat dilihat dari gejala perlawanan masyarakat dan cara masyarakat dalam melakukan aksi kepada Pihak Pertambangan PT. Dairi Prima Mineral. Dapat dilihat dari tabel pada Bab 1 bahwasanya gejala perlawanan dan aksi dari masyarakat secara dari 2019 sampai 2022 dapat dikatakan sebagai perlawanan yang konsisten. Aksi yang dilakukan pun beragam mulai dari kalangan masyarakat desa, para pelajar bahkan sampai organisasi pemerhati lingkungan juga turut serta dalam aksi ini.

Variabel dinamika berikutnya adalah resolusi konflik. Prayogo (dalam berbagai karya tulisnya tentang teori dan praktik resolusi konflik) mengemukakan bahwa resolusi konflik adalah proses penyelesaian perbedaan atau pertentangan antara individu, kelompok, atau pihak yang berkonflik melalui cara-cara yang mengarah pada penyelesaian yang menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat. Resolusi konflik ini, menurut Prayogo, tidak hanya bertujuan untuk mengakhiri konflik, tetapi juga untuk mengubah struktur hubungan antara pihak-pihak yang berkonflik, sehingga memungkinkan terciptanya kondisi yang lebih harmonis di masa depan.

Pada akhirnya Resolusi yang ditempuh masyarakat adalah menunggu pengadilan kasasi di PTUN Jakarta. Pada tanggal 12 Agustus 2024 Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta memutuskan bahwasanya izin lingkungan dari Pertambangan PT. Dairi Prima Mineral dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia mengkaji ulang Izin lingkungan tersebut. Berkat Putusan ini masyarakat sekitar tambang bisa tenang karena Tambang akhirnya di tutup walaupun hanya sementara.

Analisis dengan Teori Gerakan Sosial

Gerakan sosial merupakan suatu bentuk perjuangan kolektif yang dilakukan oleh kelompok masyarakat yang merasa terpinggirkan atau tidak puas dengan kondisi sosial-politik yang ada. Dalam konteks ini, resistensi masyarakat Dairi terhadap aktivitas petambangan yang dilakukan oleh PT. Dairi Prima Mineral (DPM) dapat dianalisis menggunakan teori gerakan sosial yang dikemukakan oleh Charles Tilly. Tilly memberikan



pemahaman bahwa gerakan sosial tidak hanya sekadar protes atau pemberontakan, tetapi merupakan upaya kolektif yang terorganisir dan memiliki tujuan untuk mengubah kondisi sosial tertentu.

Kasus dari Penelitian ini yaitu Resistensi masyarakat Desa Sopokomil terhadap Pertambangan Seng PT. Dairi Prima Mineral dimana sangat relevan dengan Teori Gerakan Sosial dari Charles Tilly. Tindakan yang Kolektif dan berulang adalah salah satu dari banyaknya faktor yang diutarakan oleh Charles Tilly. Resistensi masyarakat yang Peneliti ketahui sudah lama berlangsung dan berulang menjadikannya cocok dibahas dengan teori ini.

Adapun Perspektif pertama yaitu gerakan sosial yang Terorganisir. Selama melakukan penelitian dan *Literatur Review*, Peneliti menemukan bahwasanya pada dasarnya perlawanan masyarakat yang melawan Kehadiran tambang PT. Dairi Prima Mineral memiliki struktur yang terorganisir dan beraturan. Adapun maksud dari terorganisir adalah Perlawanan yang disatukan dari beberapa struktur masyarakat yang berbeda marga, berbeda desa, dan berbeda profesi dapat disatukan, digerakkan, dan dikumpulkan menjadi satu perlawanan yang kuat dan solid. Resistensi atau Perlawanan yang dilakukan masyarakat juga dilatarbelakangi oleh kaum religius.

Perspektif berikutnya yaitu berkelanjutan (*Sustainable*). Maksud dari perspektif berkelanjutan ini adalah bagaimana Gerakan masyarakat/gerakan sosial itu memiliki *History* atau bisa disebut dengan *Timeline* Gerakan masyarakat. Peneliti sudah membahasnya di Bab 1 dimana perlawanan masyarakat yang selalu melakukan aksi dan perjuangan melawan kehadiran tambang dimulai dari sebelum 2019 sampai pada Tahun ini. penyebab dari berlanjutnya gerakan pertentangan Masyarakat ini diakibatkan oleh para pemangku kepentingan yang tidak kunjung memberikan solusi dan penyelesaian dari masalah ini. Sampai pada akhirnya masyarakat yang mencari solusinya sendiri melakukan Peradilan Kasasi di PTUN Jakarta dan dimenangkan oleh Hakim PTUN dengan waktu pengadilan kurang lebih 64 hari.

Perspektif berikutnya adalah menolak (*Self-Conscious Challenge*). Perspektif ini adalah jiwa dari Penelitian ini, dimana Peneliti mengangkat topik perlawanan masyarakat. Tanpa adanya Perlawanan yang menolak tidak akan muncul sebuah Gerakan sosial. Perlawanan atau Penolakan masyarakat. Penolakan masyarakat yang berbeda Lokasi dan objek yang dituju, seperti yang diuraikan peneliti di Bab 1 mengungkapkan bahwa masyarakat Dairi dapat melakukan protes besar-besaran, baik di lokasi pertambangan maupun di ibu kota provinsi atau pusat pemerintahan untuk menarik perhatian lebih banyak pihak, termasuk media dan organisasi lingkungan internasional. Demonstrasi ini sering kali menjadi sarana penting untuk menekan pemerintah atau perusahaan untuk mendengarkan tuntutan mereka.

Berdasarkan perspektif Charles Tilly, gerakan sosial resistensi masyarakat Dairi terhadap kehadiran PT. Dairi Prima Mineral dapat dianalisis dengan melihat faktor-faktor seperti mobilisasi sumber daya, struktur peluang politik, identitas kolektif, aktivitas kolektif, serta reaksi dari otoritas. kesuksesan gerakan ini sangat bergantung pada sejauh mana masyarakat mampu mengorganisir diri mereka, mendapatkan dukungan dari berbagai pihak (termasuk LSM dan media), serta memanfaatkan peluang politik yang ada untuk menyuarakan penolakan terhadap proyek pertambangan yang dianggap merusak lingkungan dan merugikan kehidupan mereka.

5. KESIMPULAN

Kronologi Resistensi masyarakat yang terorganisir dan terstruktur adalah ciri dari Resistensi masyarakat Desa Sopokomil. Beragamnya masyarakat yang menolak kehadiran



tambang disatukan dengan kesamaan penderitaan dan kesamaan keluh kesah. masyarakat yang memiliki Poin tuntutan yang tidak diindahkan oleh pihak pertambangan menjadikan perlawanan ini tetap berlanjut. Adapun Poin dari tuntutan masyarakat itu adalah bagaimana keseriusan tambang dalam menjaga alam sekitar. Dikarenakan masyarakat didaerah disana pada umumnya bergantung dari Ketersediaan Alam.

Upaya-upaya masyarakat yang menjadikan berlangsungnya dan berlanjutnya perlawanan itu adalah masyarakat yang melawan dan melakukan aksi dengan berbagai cara. Dalam melakukan aksi damainya, masyarakat selalu membawa istilah adat dalam aksinya. Mangandung adalah istilah dalam bahasa Batak Toba yang berarti meratap atau menangis. Aksi Mangandung ini diharapkan dapat mengundang Pemerintah melihat masyarakatnya dan mengundang pihak yang lain untuk membantu masyarakat yang melakukan aksi.

Penelitian ini menemukan bahwa Perlawanan masyarakat Desa Sopokomil terhadap kehadiran tambang seng PT. Dairi Prima Mineral di kecamatan Silima Pungga-pungga adalah apa adanya dan sesuai dengan Fakta dilapangan. Pada Akhirnya masyarakat membuahkan hasil dari perlawanan masyarakat selama ini. PTUN Jakarta akhirnya mengetok palu dan mengabulkan permohonan Masyarakat dan menyurati Kementrian Lingkungan untuk meninjau Kembali izin lingkungan tambang PT. Dairi Prima Mineral dan mencabut Izin Lingkungan dari PT. Dairi Prima Mineral. Masyarakat yang mengeluh dari tahun 2019 bahkan sebelum tahun tersebut akhirnya bisa merasa tenang akibat putusan PTUN ini.

Oleh karena itu, Penelitian ini diharapkan memberikan Kontribusi Penting dalam bidang resistensi atau perlawanan, khususnya perlawanan masyarakat terkait dengan penolakan kehadiran sesuatu hal, pada kasus ini adalah penolakan kehadiran Pertambangan PT. Dairi Prima Mineral. Studi ini juga menunjukkan bagaimana gambaran umum resistensi dan strategi masyarakat yang melakukan perlawanan atau resistensi sehingga bisa menjadi bahan acuan bagi masyarakat yang sedang berjuang yang dicuri haknya oleh pihak yang merugikan masyarakat secara umum. Temuan ini juga dapat menjadi acuan bagi LSM yang berjuang supaya memiliki keyakinan bahwa masih ada harapan masyarakat untuk menang dan merdeka. Selain itu, Penelitian ini juga memberikan wawasan tentang pentingnya memahami karakteristik dan Strategi Resistensi dan Perlawanan masyarakat.

6. DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Alhaddi, H. (2015). Triple bottom line and sustainability: A literature review. *Business and Management studies*, 1(2), 6-10.
- Chawa, A. F. (2014). *Mining and Community Development in Indonesia: A Case Study*.
- Erman, E. (2010). *Aktor, Akses Dan Politik Lingkungan Di Pertambangan Timah Bangka*.
- Fringka, Y. (2016). *Resistensi Berbasis Adat :Perlawanan Masyarakat Nagari III Koto,Tanah Datar,Sumatera Barat, Terhadap Rencana Tambang Bukit Batubasi*.
- Hartana, S. H., Presiden, M. M., Sinar, D., & Jakarta, M. (2020). Existence And Development Group Companies In The Mining Sector (PT. Bumi Resources,TBK). *Ganesha Law Review*, 2(1).
- Ho, W. C. (2011). James Scott's resistance/hegemony paradigm reconsidered. *Acta Politica*, 46(1), 43–59. <https://doi.org/10.1057/ap.2010.59>



Idhom, A. (2009). Resistensi Komunitas Sedulur Sikep Terhadap Rencana Pembangunan Tambang Semen di Pegunungan Kendeng, Sukolilo, Pati, Jawa Tengah.

Makmur, D. (2019). Conflict and Society Resistance Towards Type-C Mining Digging At Nagan Raya Regency (The Case Study At Suak Palembang Village, Darul Makmur Sundistrict). In *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah* (Vol. 4).

MAROS, B. K., & NUR, M. RESISTENSI PENAMBANG ILEGAL: STUDI KASUS EKSPLOITASI TAMBANG GALIAN C (PASIR) DI DESA.

Lumban Gaol, A. R., Widodo, P., & Malik, I. (2023). Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi Dalam Penanganan Konflik antara Masyarakat Dengan PT.Dairi Prima Minerall. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 49(1), 23–36. <https://doi.org/10.33701/jipwp.v49i1.31523246>

Nainggolan, P. (2018). Resistensi Penambang Illegal : Studi Kasus Eksploitasi Tambang Galian B (Emas) Di Desa Sayurmatua Kecamatan Naga Juang Kabupaten Mandailing Natal.

Nur, M. (2014). Resistensi Penambang Illegal: Studi Kasus Eksploitasi Tambang Galian C (Pasir) Di Desa Borimasunggu Kabupaten Maros

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010

Putra, A., & Suryadinata, S. (2020). Menelaah fenomena klitih di Yogyakarta dalam perspektif tindakan sosial dan perubahan sosial Max Weber. *Asketik: Jurnal Agama dan Perubahan Sosial*, 4(1).

Regus, M. (2011). Tambang dan Perlawanan Rakyat: Studi Kasus Tambang di Manggarai, NTT. *Masyarakat Jurnal Sosiologi*, 16(1). <https://doi.org/10.7454/mjs.v16i1.1201>

Buku

Simarmata, Chandra, V., & Mahyuddin. (2021). Pengantar Metodologi Penelitian. Yayasan Kita Menulis.

Sugiyono. (2019). Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dan R&D. Alfabeta.

Rochadi, A. S. (2020). *Perilaku Kolektif dan Gerakan Sosial*. Rasibook.

Wirawan, D. I. (2012). *Teori-teori Sosial dalam Tiga Paradigma: fakta sosial, definisi sosial, dan perilaku sosial*. Kencana.

Website

Dairikab.bps.go.id.(2022). *Profil Kependudukan dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi Tahun 2022*

JATAM.org.(2024). *Warga Dairi kawal Kasasi Persetujuan izin lingkungan PT. Dairi Prima Mineral (PT.DPM). Warga Dairi Kawal Kasasi Persetujuan Izin Lingkungan PT Dairi Prima Mineral (PT DPM)*

JATAM.org.(2024). *Picu bencana: Hentikan Pendanaan Tiongkok untuk Tambang PT.DPM*.

Kompas.id.(2022). *PTUN Jakarta:Kontrak Karya PT.DPM dengan Pemerintah merupakan Informasi Terbuka*.



Kompas.id.(2022). *Masyarakat menuntut Dokumen Kontrak Karya Tambang
Seng di Dairi Dibuka.*

MSN.Com.(2024) *Seruan Kepada Hakim kasasi, Warga Dairi : Tambang
Datang,Kehidupan kami Hilang.* [https://www.msn.com/id-
id/berita/teknologidansains/seruan-kepada-hakim-kasasi-warga-
dairi-tambang-datang-kehidupan-kami-hilang](https://www.msn.com/id-id/berita/teknologidansains/seruan-kepada-hakim-kasasi-warga-dairi-tambang-datang-kehidupan-kami-hilang)

Mongabay.Co.Id.(2024). *Masyarakat Dairi Menanti Putusan Adil Mahkamah Agung.*
Masyarakat Dairi Menanti Putusan Adil Mahkamah Agung -
Mongabay.co.id

Opsi.Id.(2022). *Kementrian ESDM Tolak Membuka Kontrak Karya
Pertambangan ke Publik.*

PWYPIndonesia.org.(2022). *Menangkan Gugatan Informasi,kini Seluruh Kontrak
Pertambangan Batu Bara dan Mineral Terbuka untuk Publik.*

Tempo.Co.(2023). *Warga Dairi Gugat KLHK karena Terbitkan Surat Keputusan
kelayakan Lingkungan Hidup Dairi Prima Mineral.*
[https://www.tempo.co/ekonomi/warga-dairi-gugat-klhk-karena-
terbitkan-surat-keputusan-kelayakan-lingkungan-dairi-prima
mineral](https://www.tempo.co/ekonomi/warga-dairi-gugat-klhk-karena-terbitkan-surat-keputusan-kelayakan-lingkungan-dairi-prima-mineral)

Tempo.Co.(2023). *Cemas Anjing Hitam Merusak Alam.*
[https://www.tempo.co/politik/potensi-kerusakan-akibat-tambang-
dairi](https://www.tempo.co/politik/potensi-kerusakan-akibat-tambang-dairi)